



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : (0370) 7856244
Laman : ntb.kemenkum.go.id, Surel : kanwilntb@kemenkum.go.id

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025

A. Pendahuluan

1. Umum

Merujuk dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum menjadi langkah awal bagi jajaran Kementerian Hukum untuk serius dalam menerapkan SPBE melalui gagasan "birokrasi digital".

Selain itu, dalam pelaksanaan tata kelola dan manajemen implementasi e government di Indonesia, dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tersebut diharapkan pelaksanaan tata kelola dan manajemen implementasi e-government dapat dikolaborasikan, disinergikan dalam upaya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel, serta merata di seluruh Indonesia.

Sehingga percepatan kemajuan teknologi informasi mendorong kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi. Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam keterbukaan informasi publik dan kemudahan pemberian layanan secara luas kepada masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

2. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat ini memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

- a. Mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*);
- b. Mengoptimalkan penerapan pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Kanwil Kementerian Hukum NTB;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan;
- d. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan publik.

4. Dasar

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan publik. Rapat monitoring dan evaluasi dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi pada pengukuran kinerja unit telah digunakan aplikasi e-peformance untuk monitoring capaian perjanjian kinerja, kemudian digunakan aplikasi SMART dan e-monev untuk monitoring capaian output dan realisasi RKAKL.
2. Pemanfaatan teknologi informasi pada operasionalisasi SDM yang telah diakomodir pada aplikasi SIMPEG. Proses input data jurnal harian hanya bisa dilakukan pada hari H atau H-1. Kemudian untuk input jurnal harian tanggal 15-17 dapat diinput pada tanggal 14, namun hal ini bersifat tentatif sesuai dengan arahan dari biro SDM.
3. Pemanfaatan teknologi informasi pada pemberian layanan publik telah digunakan aplikasi-aplikasi inovasi dari unit pusat seperti AHU Online, DJKI online, Sidbankum, sedangkan inovasi dari Kanwil NTB sendiri adalah Siparis, E-desaku, dan Mayure.
4. Beberapa kendala yang ditemui dalam pemanfaatan teknologi informasi ini, sebagai berikut:
 - a. Koneksi internet kurang stabil, hal ini menyebabkan perekaman data tidak dapat dilakukan secara optimal
 - b. Saat menginput progres pekerjaan pengadaan sering terjadi *error* dan data tidak tersimpan dikarenakan *down performance system* disaat masa penginputan
 - c. Terbatasnya kapasitas penyimpanan pada virtual private server storage.
 - d. Perlunya pembaharuan teknologi dan penambahan fitur / modul pada beberapa aplikasi inovasi Kanwil Kementerian Hukum NTB, seperti e-Desaku dan Siparis.

C. Hasil yang Dicapai

1. Telah digunakannya teknologi informasi seperti aplikasi e-peformance, aplikasi SMART dan e-Monev guna melakukan tolok ukur terhadap kinerja unit.
2. Pemahaman oleh jajaran pegawai Kantor Wilayah dalam optimalisasi pemanfaatan SIMPEG guna melakukan input jurnal harian dilakukan pada hari H atau H-1. Kemudian untuk input jurnal harian tanggal 15-17 dapat diinput pada tanggal 14, namun hal ini bersifat tentatif mengikuti arahan dari biro SDM
3. Pemanfaatan teknologi informasi pada pemberian layanan publik telah digunakan aplikasi-aplikasi inovasi dari unit pusat seperti AHU Online, DJKI online, Sidbankum, disamping itu juga digunakan inovasi dari Kanwil NTB seperti Siparis, Edesaku, Mayure.
4. Beberapa hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI yang diperoleh, antara lain sebagai berikut:
 - a. Ditambahkan perangkat *access point* guna memperluas coverage area bagi users dalam mengakses internet via wifi
 - b. Penambahan *internet bandwidth* secara mandiri oleh Kanwil Kementerian Hukum NTB guna memberikan fasilitas internet yang memadai bagi pegawai dalam bekerja
 - c. Telah dibuatkan *virtual private server* baru oleh pusdatin dengan portal keamanan yang lebih *secure*, sehingga meminimalisir terjadinya *files spamming* pada server storage
 - d. Dilakukan pengembangan fitur terhadap beberapa aplikasi inovasi Kanwil Kementerian Hukum NTB, seperti e-Desaku dan Siparis

D. Simpulan dan Saran

Kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat telah terlaksana dengan baik. Selanjutnya, untuk mengatasi kendala yang ditemui, telah dilaksanakan koordinasi dan konsultasi ke pusat khususnya ke Pusdatin. Serta akan dilakukan pengembangan untuk beberapa aplikasi inovasi dari Kanwil seperti e-Desaku dan Siparis.

E. Penutup

Demikian laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.



Dibuat di Mataram
pada tanggal 24 September 2025
Kepala Kantor Wilayah



I Gusti Putu Milawati











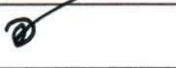

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : (0370) 7856244
Laman : ntb.kemenkum.go.id, Surel : kanwilntb@kemenkum.go.id

DAFTAR HADIR

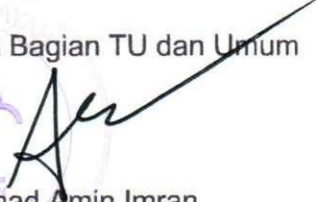
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Rabu, 17 September 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	I Gusti Rtn Milawati	Kakanwil	M.
2	Edward J. Sinaga	Kadiv P3H	
3	Anna	Kadiv Yankum	
4	M. Imran	Kabag TUUM	
5	Muzhan	Analis SDM	
6	Picky Aditya Supratman.	Analisis Anggaran	
7	PLRI A	KABID ASK	
8	Anisa Kusuma W	Aspirasi	
9	Melani Abidin	Analisis DM	
10	Heni Sulastri	"	
11	Aristy Andisa P.	"	
12	Dewi Pratipodha	Aspirasi	
13	Muhammad Ilyas	Pelaksana	
14	M. Ryan Pratama	"	
15	R. Sanjaya	Analisis SDM	
16	Erisa Febriani	Pranata Humas	
17	Hardia Fahrurrozi	Panitia Kelemb	
18	I Nyoman Budi	Pengelola program	
19	KONAL HADI JATMIKU	Pengelola Keuangan	
20	I Nengah Burhan W	Pelaksana	

21	Ni Putu Citra Apsara Devi	JFT	
22	I. Nyoman Ariyana S.	JFT	
23	I Made Dedy Gurism	JFT	
24	Kun Abdillal	JFU	
25	Rz Faqih A.R	JFT	
26	Andri: Suherman	JFU	
27	I Nyoman mas sumenti	JFU	
28	Risma Supranita	JFU	
29	Puan Rosmayas	Kabir ti	
30	I Ketut Canggih Putra	JF	

Kepala Bagian TU dan Umum



Muhamad Amin Imran
NIP 197906102000031002



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : 0370 – 7856244
Laman : www.ntb.kemenkum.go.id Surel : kanwilntb@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari : Rabu
Tanggal : 17 September 2025
Waktu : 09.00 WITA sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat Kakanwil Kementerian Hukum NTB

Peserta :
Hadir langsung : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB
2. Kepala Divisi Administrasi Kementerian Hukum NTB
3. Ketua Pokja Humas, RB dan Teknologi Informasi beserta jajaran staf;
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2025.

Jalannya acara : Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan diantaranya pembukaan dari Kepala Subbagian Humas, RB dan Teknologi Informasi, yang dilanjutkan dengan diskusi bersama terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan publik di lingkup Kanwil Kemenkum NTB.

Notulensi :
Amin Imran : Selamat siang rekan-rekan semua, terima kasih karena sudah menyempatkan hadir dalam kesempatan siang hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas terkait pemanfaatan teknologi informasi terutama dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan publik. Mempersingkat waktu, silahkan kepada rekan-rekan TI untuk menyampaikan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi selama periode bulan Januari-Maret dan kendala-kendala apa saja yang terjadi.

Citra : Selamat siang rekan-rekan semua, terima kasih atas waktu yang diberikan. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait pemanfaatan teknologi informasi selama periode bulan Januari-Maret, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi pada pengukuran kinerja unit telah digunakan aplikasi e-peformance untuk monitoring capaian perjanjian kinerja, kemudian digunakan aplikasi SMART dan e-monev untuk monitoring capaian output dan realisasi RKAKL.
2. Pemanfaatan teknologi informasi pada operasionalisasi SDM semuanya telah tercover pada aplikasi SIMPEG. Proses input jurnal harian hanya bisa dilakukan pada hari H atau H-1. Kemudian untuk input jurnal harian tanggal 15-17 dapat diinput pada tanggal 14, namun hal ini bersifat tentatif mengikuti arahan dari biro SDM.
3. Pemanfaatan teknologi informasi pada pemberian layanan publik telah digunakan aplikasi-aplikasi inovasi dari unit pusat seperti AHU Online, DJKI online, Sidbankum, disamping itu juga digunakan inovasi dari Kanwil NTB seperti Siparis, Edesaku, Mayure.

4. Perlu pembaharuan teknologi dan penambahan fitur / modul pada beberapa aplikasi inovasi Kanwil Kementerian Hukum NTB, seperti e-Desaku dan Siparis.

Imran : Kalau untuk kendalanya, apakah ada kendala yang ditemui?

Johan : Izin pak, untuk beberapa kendala yang kami temui, sebagai berikut:

- Koneksi internet terkadang tidak stabil dikarenakan belum adanya pembaharuan piranti LAN Cable, Access Point dan Mikrotik yang memadai
- Sehingga menyebabkan saat menginput progres pekerjaan pengadaan sering terjadi eror atau galat sehingga data tidak tersimpan sering mengalami down performance disaat masa penginputan

Imran : Apakah ada saran solusi dari rekan-rekan?

Ryan Adi : Izin pak, menurut saya untuk kendala jaringan internet tidak stabil perlu dilakukan kordinasi dengan Pusdatin guna dilakukan pembaharuan piranti jaringan supaya area di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB tercover koneksi wireless internet secara optimal.

Amin Imran : Baik, dengan demikian kita akan siapkan nodin guna lakukan kordinasi serta konsultasi ke pusat.

Deby : Siap pak.

Amin Imran : Saya rasa cukup untuk rapat hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan Selamat siang.

Hasil :

1. Pemanfaatan teknologi informasi pada pengukuran kinerja unit telah digunakan aplikasi e-peformance, aplikasi SMART dan e-monev.
2. Pemanfaatan teknologi informasi pada operasionalisasi SDM semuanya telah tercover pada aplikasi SIMPEG. Terdapat beberapa update pada aplikasi SIMPEG, yaitu terkait input jurnal harian hanya bisa dilakukan pada hari H atau H-1. Kemudian untuk input jurnal harian tanggal 15- 17 dapat diinput pada tanggal 14, namun hal ini bersifat tentatif mengikuti arahan dari biro SDM.
3. Pemanfaatan teknologi informasi pada pemberian layanan publik telah digunakan aplikasi-aplikasi inovasi dari unit pusat seperti AHU Online, DJKI online, Sidbankum, disamping itu juga digunakan inovasi dari Kanwil NTB seperti Siparis, Edesaku, Mayure.
4. Beberapa kendala yang ditemui, sebagai berikut:
 - a. Ditambahkan perangkat access point guna memperluas coverage area bagi users dalam mengakses internet via wifi.
 - b. Saat menginput progres pekerjaan pengadaan sering terjadi erorr dan data tidak tersimpan sering mengalami down performance disaat masa penginputan
 - c. Telah dibuatkan server baru oleh pusdatin dengan portal keamanan yang lebih secure, sehingga meminimalisir terjadinya *files spamming* pada *server storage*

Rekomendasi :

- a. Koordinasi dan konsultasi ke pusat khususnya ke Pusdatin terkait kendala pada penggunaan aplikasi-aplikasi pusat
- b. Koordinasi dengan vendor pusat terkait perbaikan jaringan internet pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB


Notulis



Deby Fakhira Hanum

Disahkan oleh

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum



Muhamad Amin Imran

**DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI**

